

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terdapat banyak negara di dunia yang perkembangan perekonomiannya dipengaruhi secara signifikan oleh perdagangan, salah satunya adalah Tiongkok. Berdasarkan data statistik dari laman *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), Tiongkok menempati peringkat pertama sebagai negara pengekspor terbesar di dunia tahun 2020.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Tiongkok dalam membuka perekonomiannya. Pada tahun 1978, Tiongkok melakukan reformasi ekonomi sebagai upaya membuka perekonomian terhadap dunia luar.<sup>2</sup> Upaya tersebut terus berlanjut hingga bergabungnya Tiongkok dalam *World Trade Organization* (WTO) di tahun 2001.

Keberhasilan Tiongkok dalam perdagangan global sangat dipengaruhi oleh kerja sama ekonomi yang kuat. Saat ini, Tiongkok telah menjalin perjanjian investasi bilateral dengan lebih dari 100 negara dan organisasi ekonomi. Selain itu, pada tahun 2023, Tiongkok tercatat memiliki 17 *Free Trades Agreements* (FTAs) dengan mitra-mitra dagang dan investasinya dan sedang menegosiasikan atau mengimplementasikan 8 FTA tambahan.<sup>3</sup> Tiongkok berhasil memanfaatkan keuntungan yang didapat dari kerja sama tersebut dan bangkit sebagai pusat manufaktur terkemuka di dunia dalam beberapa dekade terakhir.

---

<sup>1</sup> “China: The Rise of a Trade Titan,” UNCTAD, diakses pada 15 Februari 2024, <https://unctad.org/news/china-rise-trade-titan>.

<sup>2</sup> Elena Ianchovichina and Will Martin, “Trade Liberalization in China’s Accession to WTO,” *Journal of Economic Integration* 16, no. 4 (2014): 421–445.

<sup>3</sup> “China - Trade Agreements,” diakses pada 18 Februari 2024, <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-trade-agreements>.

Sebagai negara industri dan manufaktur, batu bara merupakan sumber energi utama bagi Tiongkok dan telah menjadi sangat penting bagi ekspansi ekonominya yang cepat. Sejak tahun 1978-2019, batu bara menyumbang lebih dari 50% total konsumsi energi primer komersial Tiongkok.<sup>4</sup> Tingginya permintaan batu bara dari dalam negeri menyebabkan Tiongkok juga menjadi importir batu bara terbesar di dunia. Salah satu pemasok batu bara terbesar ke Tiongkok adalah Australia. Berdasarkan data dari laman UN Comtrade, impor batu bara dari Australia ke Tiongkok sebesar 55,4% dari total impor batu bara Tiongkok pada tahun 2017 hingga 2019. Menteri Sumber Daya dan Air Australia tahun 2021-2022, Keith Pitt menyatakan bahwa batu bara merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Australia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Tiongkok menjadi mitra kerja sama yang penting bagi Australia.

Hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Australia telah berlangsung dan mengalami peningkatan sejak tahun 2009. Meningkatnya hubungan kerja sama antara kedua negara tersebut telah menjadikan Australia sebagai mitra kerja sama utama bagi Tiongkok. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor Australia, menggeser posisi negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris.<sup>6</sup> Hubungan kerja sama perdagangan bebas antara Tiongkok dan Australia diresmikan melalui penandatanganan *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA) pada 17 Juni 2015 dan mulai berlaku pada 20 Desember pada tahun yang sama.

---

<sup>4</sup> "Total Energy Consumption and Its Consumption," National Bureau of Statistics of China, diakses pada 7 Mei 2024, <https://www.stats.gov.cn/>

<sup>5</sup> "The Hon Keith Pitt MP Media Releases," Ministers for the Department of Industry, Science and Resources, diakses pada 18 Februari 2024, <https://www.minister.industry.gov.au/ministers/pitt/media-releases?page=5>.

<sup>6</sup> Jain, P., & McCarthy, G, "Between centrality and anxiety: China in Australia," *Asian Journal of Comparative Politics* 1, no.3 (2016): 244-259.

ChAFTA merupakan salah satu FTA dengan tingkat liberalisasi perdagangan dan investasi tertinggi. Pada perjanjian ini, 85,4% barang yang diperdagangkan antara kedua belah pihak akan segera dipotong tarifnya menjadi nol. Sekitar 97% ekspor Australia ke Tiongkok dan 100% ekspor Tiongkok ke Australia akan bebas tarif sesuai dengan jadwal yang telah dirancang secara bertahap.<sup>7</sup> Sejak berlakunya ChAFTA, permintaan barang Australia ke Tiongkok mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 posisi neraca perdagangan Australia surplus terhadap Tiongkok.<sup>8</sup> Hal ini juga berdampak pada peningkatan impor batu bara Tiongkok dari Australia. Pada tahun-tahun awal setelah implementasi ChAFTA, ekspor batu bara Australia ke Tiongkok meningkat, mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan menyumbang hampir 60% dari total impor batu bara Tiongkok.

Meskipun hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Australia berjalan dengan sangat baik, akan tetapi hubungan politik antara kedua negara tersebut cenderung diliputi oleh permasalahan. Perbedaan ideologi politik sering melatarbelakangi konflik yang terjadi antara keduanya. Tiongkok dengan ideologi politik komunis, sedangkan Australia dengan ideologi liberal yang condong ke sisi Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Australia mengeluarkan kebijakan pelarangan perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE, untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G Australia. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan keamanan. Hal ini berkaitan dengan Amerika Serikat yang telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai Huawei yang berhubungan dengan pemerintah dan

---

<sup>7</sup> KPMG Advisory [China] Limited, *Managing Trade & Customs in China*, Assets KPMG, 2016, diakses pada 18 Februari 2024, <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/Managing-Trade-Customs-China-201606.pdf>.

<sup>8</sup> "Australia Trade Summary 2018," World Bank, diakses pada 18 Februari 2024, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AUS/Year/2018/Summarytext>.

militer Tiongkok serta potensi risiko spionase dan sabotase yang berasal dari penggunaan peralatan Huawei setidaknya sejak tahun 2012.<sup>9</sup>

Selanjutnya, pada saat pandemi COVID-19, Perdana Menteri Australia 2018-2022, Scott Morrison mengeluarkan pernyataan yang meminta *World Health Organization* (WHO) untuk melakukan penyelidikan tuntas terhadap Tiongkok yang diduga sebagai negara asal virus tersebut. Pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Australia tersebut mendapat tanggapan keras dari Tiongkok, yang mana Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Cheng Jingye, memperingatkan akan adanya potensi reaksi ekonomi, dan menyatakan bahwa mungkin akan ada boikot populer terhadap barang-barang Australia di Tiongkok jika Canberra terus mendorong penyelidikan.<sup>10</sup>

Tiongkok mulai memberlakukan pembatasan impor secara tidak resmi (informal) terhadap produk-produk dari Australia antara bulan Mei dan November tahun 2020 dalam bentuk tarif yang lebih tinggi untuk anggur dan barley, langkah-langkah keamanan hayati terhadap beberapa daging sapi dan kayu, serta pembatasan kuota dan perpanjangan proses pemeriksaan terhadap batu bara, kapas, dan lobster. Meskipun tidak diumumkan secara resmi, langkah-langkah ini merupakan bagian dari kebijakan informal Tiongkok yang tidak terdokumentasi secara hukum atau tertulis, namun berdampak nyata terhadap arus perdagangan antara kedua negara. Akibatnya, ekspor Australia untuk barang-barang tertentu ke

---

<sup>9</sup> Jill C. Gallagher, *U.S. Restrictions on Huawei Technologies: National Security, Foreign Policy, and Economic Interests (R47012)*, 2022, diakses pada 18 Februari 2024, <https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=R47012>.

<sup>10</sup> "Australia Called for a COVID-19 Probe. China Responded with a Trade War," ABC News, diakses pada 7 Agustus 2024, <https://www.abc.net.au/news/2021-01-03/heres-what-happened-between-china-and-australia-in-2020/13019242>.

Tiongkok turun hingga hampir nol.<sup>11</sup> Bloomberg melaporkan bahwa berdasarkan analisis data pengiriman mereka, terdapat lebih dari 60 kapal yang membawa batu bara berasal dari Australia telah antri lebih dari satu bulan dan terhenti di lepas pantai Tiongkok karena tidak mendapatkan izin untuk membongkar kargo.<sup>12</sup>

Pada awal Desember 2020, ekspor batu bara Australia ke Tiongkok mengalami penurunan sebanyak 82% dan berdampak pada pengiriman batu bara Australia ke Tiongkok, sehingga pelabuhan batu bara terbesar di Newcastle, Australia menghentikan pengiriman batu bara ke Tiongkok.<sup>13</sup> Hal tersebut kemudian mengakibatkan nilai ekspor batu bara Australia ke Tiongkok menurun drastis pada tahun 2021, yaitu senilai \$1,072 juta, sedangkan pada tahun 2020 bernilai \$7,865 juta.<sup>14</sup> Selain itu, menurut Australia Financial Review dalam salah satu artikelnya, pembangkit listrik Tiongkok juga membayar 60% lebih mahal untuk membeli batu bara dari tambang Tiongkok daripada dari eksportir seperti Australia, yang menyoroti bagaimana proteksionisme dan ketegangan geopolitik menambah dampak yang dirasakan di seluruh sektor batu bara Australia.<sup>15</sup>

Meskipun Tiongkok dan Australia telah menjalin kerja sama perdagangan bebas melalui ChAFTA yang berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua negara, kebijakan pembatasan impor batu bara oleh Tiongkok pada tahun 2020

---

<sup>11</sup> "China's Trade Restrictions on Australian Export," United States Studies Centre, diakses pada 15 Mei 2024, <https://www.ussc.edu.au/chinas-trade-restrictions-on-australian-exports#footnote-def-1>.

<sup>12</sup> "If China Stops Taking Australia's Coal, Will Other Countries Fill the Gap?," ABC News, diakses pada 8 Mei 2024, <https://www.abc.net.au/news/2020-12-16/will-other-countries-replace-china-buying-australian-coal/12985956>

<sup>13</sup> "China's Unofficial Ban on Australian Coal Sees Exports Halt as Trade War Rages - ABC News," diakses pada 5 Maret 2024, <https://www.abc.net.au/news/2020-12-09/chinas-unofficial-ban-on-australian-coal-sees-exports-cease/12960254>.

<sup>14</sup> "UN Comtrade Analytics - Trade dashboard," diakses pada 18 Februari 2024, <https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/>.

<sup>15</sup> "Pain for Coal Miners as China Buys Local," Australia Financial Review, diakses pada 16 Mei 2024, <https://www.afr.com/companies/mining/pain-for-coal-miners-as-china-buys-local-20200714-p55bww>.

menunjukkan bahwa dinamika politik dapat mengintervensi hubungan ekonomi secara signifikan. Yang menjadi perhatian utama adalah bahwa kebijakan ini bersifat informal, yakni tidak diumumkan melalui regulasi resmi atau dokumen kebijakan publik, namun dijalankan secara sistematis melalui hambatan teknis seperti penundaan pemeriksaan, pembatasan kuota, dan larangan tidak langsung terhadap aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Sifat informal dari kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi Australia sebagai mitra dagang, sehingga serta menyulitkan Australia untuk menempuh jalur diplomatik atau penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional seperti WTO.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tiongkok dan Australia memiliki hubungan kerja sama ekonomi, yaitu kerja sama perdagangan bebas *China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA)*. Berdasarkan isi dari perjanjian tersebut, kedua negara ingin meningkatkan intensitas perdagangan dan perekonomian mereka. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan tarif dan hambatan lainnya bagi produk dari kedua belah pihak. Permintaan barang Australia ke Tiongkok meningkat, sehingga pada tahun 2018 posisi neraca perdagangan Australia surplus terhadap Tiongkok. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah perdagangan komoditas energi, termasuk batu bara, di mana Australia menjadi salah satu pemasok utama bagi Tiongkok. Namun, pada tahun 2020, Tiongkok menerapkan serangkaian pembatasan terhadap produk-produk ekspor Australia dan batu bara menjadi salah satu target dari kebijakan Tiongkok tersebut. Hal ini menyebabkan impor batu bara Australia ke Tiongkok menurun drastis hingga tahun 2022. Oleh karena itu,

perlu dilakukan analisis terkait faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa saja faktor yang mendorong Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan impor batu bara dari Australia pada tahun 2020?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batu bara dari Australia pada tahun 2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi ilmu hubungan internasional, terutama kepada civitas departemen Ilmu Hubungan Internasional UNAND mengenai perdagangan global, yang berfokus pada kebijakan proteksionisme dalam perdagangan bebas. Temuan dari penelitian ini tidak hanya dapat menambah wawasan literature akademik yang ada, akan tetapi juga memberikan pemahaman terkait faktor yang menyebabkan suatu negara merumuskan kebijakan proteksionisme dalam perdagangan bebas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Perdagangan Tiongkok, Australia, dan Indonesia sebagai sumber informasi

dan pemahaman terkait dinamika hubungan kerja sama dalam perjanjian perdagangan bebas, terutama bagi yang bergerak di bidang ekspor batu bara.

## 1.6 Studi Pustaka

Terdapat lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini dan dapat digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu: Pertama, penelitian oleh Victor A. Ferguson, Scott Waldron, dan Darren J. Lim berjudul “*Market adjustments to import sanctions: lessons from Chinese restrictions on Australian trade, 2020–21.*” Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pengalaman industri berorientasi ekspor Australia yang kehilangan akses ke pasar Tiongkok selama periode sanksi yang dimulai pada Mei 2020. Penulis merujuk kebijakan pembatasan impor Tiongkok terhadap produk ekspor Australia sebagai bentuk sanksi perdagangan yang masuk dalam kategori *economic coercion*. Sebagai tujuan ekspor yang paling berharga bagi banyak industri Australia, pembatasan impor Tiongkok terhadap setidaknya sembilan produk Australia yang berbeda seperti barli, daging, *wine*, kapas, lobster, kayu, dan batu bara menimbulkan kekhawatiran yang meluas, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa ketergantungan Australia terhadap Tiongkok membuatnya sangat rentan.<sup>16</sup> Para analis meramalkan dampak ekonomi akan sangat parah dan akan menyebabkan Australia berada dalam tekanan politik yang signifikan untuk menenangkan Tiongkok.

---

<sup>16</sup> Victor A. Ferguson, Scott Waldron & Darren J. Lim, “Market adjustments to import sanctions: lessons from Chinese restrictions on Australian trade 2020–21,” *Review of International Political Economy* 30, no.4 (2022): 1255-1281.

Dalam penelitian tersebut terdapat data variasi nilai ekspor Australia ke Tiongkok dibandingkan dengan ekspor global bersih Australia dan referensi silang statistik ekspor Australia dengan statistik impor Tiongkok. Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan signifikan pada ekspor produk Australia ke Tiongkok, salah satunya adalah batu bara Australia ke Tiongkok dari tahun 2015 dan 2019. Selain itu, juga ditunjukkan data penurunan ekspor Australia Sejak diberlakukannya pembatasan impor oleh Tiongkok pada Mei 2020, penurunan ekspor produk batu bara Australia ke Tiongkok mencapai hingga 98%. Meskipun penelitian ini terbatas pada pembatasan impor Tiongkok terhadap ekspor produk Australia secara umum dan bagaimana strategi Australia untuk menghadapinya. Namun, data yang disediakan oleh penelitian ini dapat membantu penulis dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, dengan memahami pembatasan impor yang diberlakukan oleh Tiongkok dari sudut pandang Australia juga dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan ini.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian dan tujuan penelitian. Pada penelitian tersebut yang menjadi objek dari penelitiannya adalah Australia. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi Australia dalam menghadapi sanksi ekonomi berupa pembatasan impor terhadap beberapa produk ekspor Australia. Sedangkan, dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Tiongkok dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Tiongkok memutuskan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia.

Kedua, penelitian oleh J. Giesecke, N. Tran, dan R. Waschik yang berjudul "*Should Australia be concerned by Beijing's trade threats: modelling the*

*economic costs of a restriction on imports of Australian coal.*” Tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa terhitung dengan batu bara, sekitar 70% ekspor Australia ke Tiongkok adalah produk primer, yang sebagian besar tidak dibedakan berdasarkan negara asal. Pembatasan impor produk-produk dari Australia oleh Tiongkok perlu digantikan oleh pemasok internasional lain yang mengalihkan ekspor mereka ke Tiongkok, sehingga membuka pasar baru bagi eksportir Australia. Selain itu, 60% ekspor Australia ke Tiongkok adalah bijih dan produk batu bara.<sup>17</sup> Sektor pertambangan Australia yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi secara umum juga terkena dampak dari pembatasan impor Tiongkok dan akan berdampak pada pendapatan domestik Australia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Tiongkok dalam membatasi produk batu bara Australia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut.

Penelitian tersebut memiliki kontribusi sebagai data pelengkap terkait pentingnya produk batu bara bagi kedua negara, terutama bagi Australia yang menjadi target pembatasan impor batu bara oleh Tiongkok. Penelitian ini juga memberikan prediksi terkait apa yang terjadi ketika Australia kehilangan Tiongkok sebagai pasar besar ekspor komoditas batu baranya. Selain itu, penelitian tersebut juga memberikan penjelasan terkait mengapa Tiongkok memutuskan untuk menghentikan impor batu bara Australia di saat Australia adalah eksportir terbesar bagi Tiongkok. Penjelasan tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti

---

<sup>17</sup> Giesecke, James A., Nhi Hoang Tran and Robert Waschik, “Should Australia be concerned by Beijing’s trade threats: modelling the economic costs of a restriction on imports of Australian coal,” *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 65, (2021): 1-22.

dalam menemukan faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan dalam membatasi impor batu bara dari Australia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Fokus pada penelitian tersebut adalah kerugian yang dialami oleh Australia karena kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batu bara. Sedangkan, fokus pada penelitian penulis adalah faktor penyebab kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batu bara Australia. Selain itu, penelitian tersebut tidak melibatkan kondisi domestik Tiongkok dalam analisisnya, sedangkan penelitian penulis melibatkan kondisi domestik Tiongkok pada bagian analisis.

Ketiga, penelitian oleh Verensia Vista Monzalsha, Arie Kusuma Paksi, dan Muhammad Dafa Hanggariksa yang berjudul *“Australia-China Trade Tensions During the Covid-19 Pandemic: Australia’s Reaction to China Trade Sanctions.”* Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan tentang perekonomian Australia yang sangat bergantung pada ekspor karena ekspor mengambil peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan yang baik. Australia berupaya menjalin hubungan dengan negara-negara Asia, khususnya Tiongkok untuk meningkatkan perdagangan ekspornya. Hubungan antara kedua negara sempat melemah, terutama ketika Australia ingin memimpin seruan global untuk melakukan investigasi terhadap asal-usul COVID-19, yang menyebabkan Tiongkok menjatuhkan banyak sanksi perdagangan terhadap Australia.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kekesalan Tiongkok terhadap Australia dimulai ketika Australia menjadi negara pertama yang secara terbuka

melarang Huawei berpartisipasi dalam jaringan 5G-nya karena kekhawatiran bahwa raksasa teknologi itu akan membocorkan data kepada pemerintah Tiongkok.<sup>18</sup> Meskipun Tiongkok telah berulang kali menyangkal, pemerintah tetap teguh pada keputusannya untuk memberikan sanksi kepada Huawei. Pada tahap awal dengan pemerintahan Rudd pada tahun 2010, NBN (National Broadband Network) secara diam-diam memutuskan untuk tidak menerima tawaran Huawei untuk berpartisipasi dalam pengembangan jaringan broadband. Pemerintahan Gillard kemudian secara resmi mengumumkan pembatasan NBN terhadap Huawei hingga Pemerintah Turnbull melarang Huawei dan ZTE membangun jaringan 5G Australia pada tahun 2018.

Kontribusi penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah membantu dalam memberikan informasi mengenai dinamika hubungan perdagangan Tiongkok dan Australia. Kedua negara terlibat dalam kerja sama perdagangan yang cukup erat. Hal ini ditunjukkan dalam data yang terdapat dalam penelitian tersebut terkait peningkatan ekspor Australia ke Tiongkok dari tahun 2014 hingga sebelum berlakunya sanksi dari Tiongkok. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan aspek politik yang terlibat dalam hubungan perdagangan Tiongkok dan Australia, yaitu isu keamanan Huawei dan ZTE serta investigasi terhadap asal COVID-19.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap dinamika hubungan perdagangan Tiongkok dan Australia selama pandemi dengan tujuan menjelaskan reaksi Australia terhadap sanksi ekonomi Tiongkok.

---

<sup>18</sup> Verensia Vista et al., "Australia-China Trade Tensions During the Covid-19 Pandemic: Australia's Reaction to China Trade Sanctions," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 2 (2023): 154–169.

Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang menyebabkan Tiongkok membatasi impor batu bara dari Australia. Selain itu, konsep yang digunakan dalam analisis penelitian tersebut juga berbeda dengan konsep yang penulis gunakan. Pada penelitian tersebut digunakan konsep organisasi internasional untuk menjelaskan reaksi Australia sebagai negara dalam menghadapi sanksi ekonomi dari Tiongkok yang merupakan rekan kerja sama bilateralnya, sedangkan penulis menggunakan konsep proteksionisme untuk menjelaskan permasalahan tersebut dari sudut pandang Tiongkok.

Keempat, penelitian oleh Gistyger H. Manullang dan Rika Isnarti yang berjudul “*China’s Energy Diplomacy to Coal Imports from Indonesia After Restricting Coal Import from Australia in 2019.*” Penelitian ini menganalisis diplomasi energi Tiongkok terkait impor batubara dari Indonesia setelah Tiongkok membatasi impor batu bara dari Australia pada tahun 2019.<sup>19</sup> Setelah membatasi impor batubara dari Australia pada tahun 2019, maka pasokan impor batubara Tiongkok akan akan berkurang. Hal ini membuat Tiongkok perlu menambah impor batu bara dari negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan batu bara domestik.

Kontribusi penelitian tersebut bagi penelitian ini adalah memberikan rasionalisasi terhadap kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batu bara dari Australia. Tiongkok dan Indonesia merupakan salah satu importir dan eksportir batu bara terbesar di dunia, selain itu keduanya juga terlibat dalam kerja sama bilateral seperti perjanjian perdagangan bebas. Hal ini menguntungkan bagi

---

<sup>19</sup> Manullang, Gistyger Hasudungan, and Rika Isnarti, “China’s Energy Diplomacy to Coal Imports from Indonesia After Restricting Coal Import from Australia in 2019,” *Indonesian Journal of Energy* 6, no. 2 (2023): 72-85.

Tiongkok karena memiliki opsi selain Australia yang sebelumnya merupakan pemasok batu bara terbesar ke Tiongkok. Karena itu, penelitian ini dapat membantu mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada batasan tahun penelitian dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya memiliki batasan penelitian dari tahun 2019, yaitu ketika masih belum ada keterangan dari pihak Tiongkok mengenai pembatasan impor batu bara Australia. Sedangkan, penulis menetapkan batasan penelitian dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu sejak pihak Tiongkok secara resmi memberlakukan tarif terhadap produk-produk Australia termasuk batu bara. Fokus penelitian penelitian tersebut adalah pada upaya kerja sama Tiongkok terhadap Indonesia untuk mendapatkan pasokan batu bara setelah memberlakukan pembatasan impor terhadap batu bara Australia, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara Australia.

Kelima, penelitian oleh Ida Ayu Prayanti, Sukma Shusanti, dan A. A. Bagus Surya Widya Nugraha dengan judul *“Kepentingan Australia dalam Memberlakukan Pembatasan Impor bagi Produk Apel Selandia Baru.”* Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepentingan nasional Australia dalam pemberlakuan pembatasan impor produk apel Selandia Baru. Hal ini dipicu oleh penyebaran hama penyakit busuk daun di Auckland, Selandia Baru pada tahun 1919. Proses negosiasi antara Pemerintah Australia dan Selandia Baru

dilakukan dari tahun 1986 hingga 2008. Pemerintah Australia memberlakukan pembatasan impor berdasarkan Kebijakan Karantina Australia 1908 yang secara khusus mengacu pada penelitian ilmiah dalam laporan Analisis Risiko Impor Akhir. penelitian ini menunjukkan pembatasan impor produk apel Selandia Baru adalah untuk membangun kepentingan ekonomi, terutama dalam upaya melindungi pasar domestik.

Kontribusi penelitian tersebut bagi penelitian penulis adalah menjelaskan keterkaitan kebijakan luar negeri suatu negara dengan perekonomian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fenomena pembatasan dan pembatasan impor yang terjadi patut dikaji menggunakan berbagai perspektif. Penelitian tersebut mengaitkan antara kepentingan ekonomi Australia dengan kebijakan proteksionisme. Hal ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi aspek ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam membatasi impor batu bara Australia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan negara. Penelitian sebelumnya mengangkat topik permasalahan perdagangan yang terjadi antara Australia dan Selandia Baru pada tahun 1908. Sedangkan, penulis mengangkat topik penelitian permasalahan perdagangan antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2020. Selain itu, dalam penelitian tersebut kebijakan luar negeri Australia tidak terlepas dari politik domestiknya, yaitu industri apel dalam negeri Australia, elit politik, kelompok-kelompok serikat pekerja serta petani apel dalam negeri Australia. Hal ini jelas berbeda dengan

pengambilan keputusan Tiongkok yang hanya melibatkan satu partai politik negara.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Proteksionisme

Dinamika hubungan internasional tidak terlepas dari ketegangan dan konflik yang terjadi antarnegara di dunia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh tiap negara. Kepentingan nasional tersebut dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang meliputi keputusan, strategi, dan tujuan suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain. Menurut Jasmine Ahmed, kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri juga disebut sebagai cerminan dari kebijakan domestik negara.<sup>20</sup>

Bojang mendefinisikan kebijakan luar negeri terdiri atas tiga bagian, yaitu tujuan (end), cara (ways), dan sarana (means).<sup>21</sup> Pertama, tujuan (end) meliputi hasil yang diinginkan oleh suatu negara atau kepentingan dari interaksinya dengan negara atau aktor lainnya. Kedua, cara (ways) adalah strategi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, sarana (means) merupakan sumber daya seperti ekonomi dan militer yang digunakan dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, proteksionisme

---

<sup>20</sup> Jasmine Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 2 (2020): 788.

<sup>21</sup> Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018): 2.

sebagai kebijakan ekonomi dapat menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri suatu negara pada bagian cara (ways) dan sarana (means). Hal ini juga termasuk kebijakan informal seperti keputusan suatu negara terkait posisinya terhadap negara lain atau kebijakan yang tidak dituliskan secara resmi dalam *White Paper*.<sup>22</sup>

Kebijakan proteksionisme dirumuskan untuk menghadapi dan mencegah proses perdagangan bebas. Proteksionisme sendiri diartikan sebagai bentuk kebijakan yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dagang dari luar atau lingkup internasional. Kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mendorong industri nasional ini diimplementasikan dengan menerapkan kebijakan tarif atau *tariff barriers* (TF) dan kebijakan *Non-tariff Barriers* (NTB). Hambatan tarif diimplementasikan dengan bea masuk imbalan (countervailing duty), bea masuk anti dumping, dan bea masuk imbalan (surcharge). Sementara itu, hambatan non-tarif dapat dilihat melalui pembatasan, sistem kuota, ketentuan teknis, nilai pabean, dan peraturan kesehatan/karantina.

Dalam hal ini, proteksionisme dapat dipahami sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri, terutama apabila kebijakan tersebut digunakan sebagai strategi untuk menekan, membalas, atau mempengaruhi negara mitra. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab proteksionisme memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai motif dan kepentingan suatu negara dalam merespons kondisi eksternal. Dengan mengetahui alasan suatu negara

---

<sup>22</sup> Jasmine Ahmed, 788.

memilih langkah proteksionis, dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada kombinasi pertimbangan domestik dan strategi internasional.

Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme menjadi penting dalam konteks kajian kebijakan luar negeri, karena kebijakan perdagangan bukan semata-mata persoalan ekonomi domestik, melainkan juga dapat mencerminkan sikap dan posisi suatu negara dalam hubungan internasional. Ketika suatu negara menerapkan pembatasan perdagangan terhadap negara lain, kebijakan tersebut sering kali tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi internal, tetapi juga untuk menyampaikan sinyal politik, menegosiasikan posisi strategis, atau merespons dinamika diplomatik tertentu.

Analisis terhadap faktor penyebab proteksionisme tidak hanya memberikan pemahaman terhadap dimensi ekonomi dari suatu kebijakan, tetapi juga mengungkap arah serta kepentingan strategis dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Proteksionisme dapat menjadi instrumen dalam merespons dinamika hubungan internasional, terutama ketika digunakan sebagai alat tekanan atau negosiasi terhadap negara lain. Dalam hal ini, pemahaman atas motif di balik kebijakan proteksionisme menjadi penting untuk menafsirkan sikap dan orientasi politik suatu negara di panggung global. Hal ini sesuai dengan faktor penyebab kebijakan proteksionisme yang dikemukakan oleh Suhail Abboushi dalam penelitiannya yang berjudul *“Trade Protectionism: Reasons and Outcome.”*

Suhail Abboushi berpendapat bahwa terdapat lima alasan yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme suatu negara, yaitu:<sup>23</sup>

1. *National Defense*

Perlindungan terhadap industri pertahanan dalam negara dinilai penting untuk melindungi kesiapan negara menghadapi masa-masa sulit. Tapi, seiring dengan berkembangnya zaman, konsep pertahanan nasional juga semakin kompleks. Dalam tulisannya, Suhail menjelaskan bahwa perlindungan terhadap industri pertahanan seperti industri senjata dan pesawat tempur memang penting, akan tetapi agar industri tersebut tetap berjalan, maka dibutuhkan industri lain yang terlibat di dalamnya seperti industri plastik, besi, kimia, dan komputer.

2. *Balance of Payments*

Balance of payment (BoP) adalah suatu catatan yang merangkum semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks teori proteksionisme, BoP memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dengan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang domestik. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menetapkan tarif agar permintaan produk dari luar negeri menurun dan pemerintah dapat mendorong produsen dalam negeri untuk menggantikan produk tersebut. Selain itu, kebijakan proteksionisme juga mendukung negara

---

<sup>23</sup> Suhail Abboushi, "Trade protectionism: reasons and outcomes," *Competitiveness Review* 20, no. 5, (2010): 384-394.

untuk melakukan ekspor untuk meraih surplus pada neraca perdagangan.

### 3. *Employment*

Tingginya dominasi produk impor di suatu negara dapat menyebabkan industri lokal berkurang karena permintaannya yang terus menurun. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan di negara tersebut yang kemudian berkembang menjadi masalah pengangguran karena industri lokal yang semakin berkurang. Proteksionisme dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Dengan mengurangi jumlah barang impor, perusahaan domestik mungkin akan mengalami peningkatan penjualan, yang dapat menghasilkan peningkatan produksi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

### 4. *Infant Industries*

*Infant Industries* merupakan argumen klasik proteksionisme, *infant industry* belum memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi maupun keterampilan manufaktur layaknya industri besar sehingga peran pemerintah diperlukan untuk melindunginya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah maka akan sulit bersaing dengan industri yang lebih besar pada pasar global. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi produk-produk domestik dari persaingan industri yang lebih besar dari negara lain dengan cara membatasi impor barang dari negara-negara yang memiliki industri maju tersebut.

## 5. *Level Playing Field*

Pemerintah memberlakukan langkah-langkah proteksi terhadap bisnis asing jika pemerintah mereka melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri mereka. Tujuannya adalah untuk menggunakan efek timbal balik dan menekan pemerintah asing agar menurunkan atau menghapus langkah-langkah proteksi mereka. Argumen ini juga dikenal sebagai kebijakan “fair trade” dan dipraktikkan oleh pemerintah di seluruh dunia yang mempengaruhi banyak industri. Selain itu, sering kali menghasilkan undang-undang yang kuat yang mengamankan penggunaan perlindungan *quid pro quo*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjawab pertanyaan penelitian peneliti memilih untuk menggunakan konsep proteksionisme dalam mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Tiongkok menerapkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan lima poin yang melatarbelakangi kebijakan proteksionisme menurut Suhail Abboushi, yaitu *National defense*, *Balance of payments*, *Employment*, *Infant industries*, dan *Level playing field* untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan Tiongkok menetapkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang menggali dan memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam terhadap

data yang bersifat deskriptif.<sup>24</sup> Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan laman berita yang berisi pernyataan resmi suatu negara atau aktor lainnya. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksud adalah Tiongkok sebagai negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Australia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian berjenis deskriptif analisis bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu isu atau fenomena menggunakan data-data yang didapat dari majalah berita, laporan resmi, jurnal, dan artikel penelitian ilmiah. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia, meskipun keduanya telah terlibat dalam kerja sama perdagangan bebas ChAFTA yang dengan jelas menyatakan bahwa kedua negara setuju untuk menghapuskan hambatan perdagangan.

### **1.8.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah dari tahun 2015-2022. Hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Australia sudah terjalin jauh sebelum disetujuinya *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA) pada 2015. Namun, sejak keduanya terlibat dalam kerja sama ekonomi yang lebih serius, kedekatan antara Tiongkok dan Australia menjadi perhatian bagi dunia perdagangan global, terutama saat terjadi ketegangan antara kedua negara

---

<sup>24</sup> Merriam, Sharan B, and Elizabeth J Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (San Francisco, Ca: Jossey-Bass, 2015), quoted in Hani Subakti dkk, *Bunga Rampai: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 105.

tersebut. Pada tahun 2020, Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara Australia yang berlangsung hingga tahun 2022.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan, dan sering disebut sebagai variabel dependen.<sup>25</sup> Berdasarkan penelitian ini, maka unit analisis adalah Tiongkok. Sedangkan, unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, unit eksplanasi adalah pembatasan impor batu bara Australia tahun 2020.

Tingkat analisis atau level analisis didefinisikan sebagai acuan posisi dari unit yang akan diteliti.<sup>27</sup> Menurut Mochtar Mas'oeed, tingkat atau level analisis terdiri dari lima, yaitu: pertama, perilaku individu atau tokoh individu yang mempengaruhi suatu keputusan melalui persepsi, kepribadian, atau tingkah laku, seperti presiden dan kepala pemerintahan. Kedua, perilaku kelompok di dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional. Ketiga, perilaku negara-bangsa atau interaksi dan dinamika proses pembuatan keputusan suatu negara di dalam hubungan internasional. Keempat, perilaku pengelompokan negara-negara atau regional atau interaksi antar-negara yang berupa seperti aliansi, persekutuan perdagangan, dan lain-lain. Kelima, perilaku sistem internasional atau suatu fenomena atau dinamika perilaku aktor di dalam sistem internasional, seperti

---

<sup>25</sup> Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1990), 39.

<sup>26</sup> Mochtar Mas'oeed, 39.

<sup>27</sup> Mochtar Mas'oeed, 40-41.

hukum internasional.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan tingkat analisis atau level analisis di tingkat perilaku negara dengan model hubungan unit analisis dan eksplanasi penelitian korelasional karena unit analisis dan unit eksplanasi berada di tingkat yang sama, yaitu di tingkat negara.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.<sup>29</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data sekunder, yaitu studi pustaka (*library research*) seperti buku, jurnal, buku dan jurnal online, situs web resmi, arsip pemerintahan, dan berita daring yang diambil dari situs web terpercaya.

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri dari buku, jurnal, artikel jurnal, situs web resmi, dan berita daring yang diambil dari situs web terpercaya. Buku yang penulis gunakan seperti buku *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* tahun 1990 oleh Mochtar Mas'ood, *Bunga Rampai: Metodologi Penelitian Kualitatif* tahun 2020 oleh Hani Subakti dkk, dan *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* tahun 1994 oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Selain itu, juga terdapat beberapa jurnal dan artikel jurnal yang penulis gunakan seperti Jain, P., & McCarthy, G, "Between centrality and anxiety: China in Australia dan IEA, "Coal In the Energy Supply of China,"

---

<sup>28</sup> Mochtar Mas'ood, 46-47.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: IKAPI, 2016), 225.

Penulis juga menggunakan data yang bersumber dari situs web resmi seperti situs milik UNCTAD (<https://unctad.org>), ITA (<https://www.trade.gov>), Kementerian Industri Australia (<https://www.minister.industry.gov.au>), World Bank (<https://wits.worldbank.org>), dan UN Comtrade (<https://comtrade.un.org>). Selain itu, situs web resmi milik China's National Development and Reform Commission (NDRC) menjadi sumber yang penting terkait pernyataan Tiongkok terkait kebijakan pembatasan impor terhadap batu bara Australia. Adapun sumber berita daring terpercaya yang digunakan dalam penelitian ini seperti ABC News, The Guardian, The Diplomat, dan Reuters.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Teknik analisis tersebut terdiri dari tiga tahapan, yaitu:<sup>30</sup>

#### 1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan seleksi, pengurangan, penyederhanaan, dan transformasi data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, maka akan dilakukan pengurangan terhadap data yang tidak relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan impor batu bara Australia oleh Tiongkok pada tahun 2020, sehingga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya. Data yang telah dikumpulkan dan disederhanakan akan disusun dalam bentuk narasi yang kemudian

---

<sup>30</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (United States of America: SAGE Publications, 1994), 11.

menggambarkan temuan utama dalam penelitian ini, yaitu faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia pada tahun 2020.

## 2. Penyajian Data

Dalam tahapan ini dilakukan proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang dipilih, yaitu proteksionisme. Data yang sebelumnya telah melalui proses reduksi akan disampaikan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif agar dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis akan menyampaikan data hasil temuan, yaitu impor batu bara Australia ke Tiongkok sejak berlakunya ChaFTA hingga tahun 2022 berupa tabel, grafik, dan diagram dalam bentuk teks.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan terhadap data yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Hasil analisis data yang diinterpretasikan dan dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, tahap penarikan kesimpulan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia tahun 2020.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi

pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Kebijakan Energi dan Industri Batu Bara Tiongkok**

Bab ini akan menjelaskan mengenai arah kebijakan energi nasional Tiongkok, posisi strategis batu bara dalam struktur energi negara tersebut, serta bagaimana sektor batu bara dikelola sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. Fokus pembahasan akan mencakup struktur konsumsi energi nasional, kebijakan pemerintah terhadap pengembangan energi fosil khususnya batu bara, dan peran batu bara dalam mendukung sektor industri serta ketahanan energi nasional.

## **BAB III Pembatasan Impor Batu Bara dari Australia ke Tiongkok**

Bab ini akan menjelaskan terkait dinamika hubungan Tiongkok dan Australia yang melatarbelakangi kebijakan pembatasan impor batu bara dari Australia ke Tiongkok pada tahun 2020, dari sisi politik dan ekonomi. Kronologi dari implementasi kebijakan akan dibahas secara detail berdasarkan dinamika yang terjadi.

## **BAB IV Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Kebijakan Tiongkok dalam Membatasi Impor Batu Bara Australia**

Pada bab ini dibahas mengenai faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor batu bara dari Australia pada

tahun 2020. Bab ini merupakan bagian pengujian terhadap teori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis, yaitu teori proteksionisme.

## **BAB V Kesimpulan**

Bagian ini berisi tentang rangkuman pembahasan dari penelitian ini beserta saran dari penulis untuk penulis selanjutnya dan pihak yang terlibat dalam melanjutkan atau mengembangkan penelitian agar lebih baik.

